



Terlalu Banyak Jalur Tikus

Akan Sulit Awasi Pemudik Lokal



TJ/TRO

dan lorong-lorong itu banyak.

K. Baskara Aji
Sekda DIY

Tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh antar kabupaten/kota. Jalan tikus

SLEMAN, TRIBUN - Pemerintah Pusat resmi melarang mudik di wilayah aglomerasi (pemukatan kawasan tertentu) atau akrab disebut mudik lokal. Satu di antara wilayah aglomerasi yang diberlakukan larangan kegiatan mudik, adalah Yogyakarta Raya, terdiri dari Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Dengan demikian, lalu lintas mudik di wilayah ini tidak diperbolehkan.

● ke halaman 7

Jangan Pulang

- Pelarangan mudik di kawasan aglomerasi bagi DIY akan sulit diterapkan.
- Batas antarkabupaten yang menyatu menjadi kendala dalam melakukan identifikasi pemudik.
- Belum dengan banyaknya jalur tikus yang tidak mungkin dijaga secara penuh oleh petugas.
- Yogyakarta Raya merupakan satu dari delapan wilayah aglomerasi yang sebelumnya diizinkan untuk aktivitas mudik lokal.
- Upaya penyebaran di wilayah DIY dipastikan sulit tercapai secara efektif. Sebab lalu lintas manusia antarwilayah DIY sangat cair dan bukan untuk kepentingan mudik.
- Satu yang bisa di maksimalkan adalah peran Satgas Covid-19 di RT/RW untuk melakukan pengawasan.

Terlalu Banyak

• Sambungan Hal 1

Aturan tersebut diberlakukan demi mencegah penularan Covid-19. Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Sleman, Arip Pramana mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi tersebut. Namun, hingga saat ini diakuinya belum dibahas di tingkat kabupaten, karena Sekretaris Daerah masih bertugas di luar kota. "Sekarang masih boleh (mudik di kawasan aglomerasi). Kami belum ambil sikap," kata dia, Jumat (7/5).

Saat ini, Dinas Perhubungan Sleman masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemda DIY untuk mulai membatalkan larangan mudik di kawasan aglomerasi. Sebab, kesulitan yang dihadapi petugas di lapangan akan lebih tinggi dibanding penyekatan antarprovinsi.

Arip mencontohkan, jalur yang sangat mungkin bisa dilalui pemudik antara wilayah Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta banyak sekali. "Itu kan diimplementasinya agak susah," ucapnya.

Arip menilai batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten lain di DIY sudah saling terhu-

bung, atau dengan kata lain sangat abu-abu. Semisal, Sleman dengan Bantul, keduanya memiliki wilayah yang saling beriringan, yaitu di depan Ambarukmo Plaza, Caturtunggal.

Karena itu, penerapan kebijakan larangan mudik lokal antarwilayah aglomerasi memiliki tingkat kesulitan tinggi, sebab hampir tidak mungkin dilakukan penyekatan. "Kami masih menunggu instruksi dari Bapak Gubernur," jelas Arip.

Arip menilai, kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi sulit diterapkan. Paling memungkinkan, kata dia, mengoptimalkan Satgas Penanganan Covid-19 mikro di tingkat RT RW dan padukuhan. Sebab, dibanding satgas kabupaten, satgas tingkat mikro bisa mengidentifikasi mana pemudik dan bukan. "Pemudik didata di tingkat RT," ujar dia.

Terpisah, Kasatlantas Polres Sleman, AKP Anang Tri Nuvian mengaku belum mengetahui soal larangan mudik pada wilayah aglomerasi. Sementara ini, menurutnya, antarkabupaten di wilayah DIY masih diperbolehkan untuk mobilitas perpindahan manusia. "Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut," kata dia.

Kesulitan

Sekretaris Daerah DIY, Ka-

darmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya merasa kesulitan untuk melakukan penyekatan di wilayah perbatasan antarkabupaten/kota di DIY. Selain membutuhkan banyak tenaga, akses jalan di perbatasan kabupaten/kota di DIY juga tergolong banyak. Sehingga dikhawatirkan upaya penyekatan menjadi tak efektif.

"Tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh antar kabupaten/kota. Jalan tikus dan lorong-lorong itu banyak. Mungkin kalau Kulon Progo lebih mudah, tapi Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan kota lain tidak bisa diatasi," terang Aji saat ditemui di kantornya, Jumat (7/5).

Sebagai strategi sementara, Aji akan meminta Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi warganya yang akan melakukan perjalanan mudik. "Mungkin strategi kita akan mengandalkan lurah, RT, RW untuk membatasi (mobilitas). Waktu orang keluar RT RW kan kelihatan, langsung dicegat sama satgas," urainya.

Hingga saat ini, Pemda DIY belum menerima petunjuk khusus terkait kebijakan larangan mudik lokal. Aji justru mengetahui perubahan kebijakan itu dari pemberitaan media. Namun, jika hal itu me-

ng merupakan regulasi dari pemerintah pusat, maka Pemda DIY akan menerapkannya seoptimal mungkin. "Kalau itu sifatnya imbauan nanti Pak Gubernur akan mempunyai kebijakan sendiri. Kalau memang rekomendasi berupa instruksi atau larangan, ya, akan kita lakukan," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku belum menerima arahan dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik lokal. Namun Sultan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Lah iya mengikuti, tidak mungkin tidak. Saya kan enggak punya dasar kalau pemerintah pusat mencabut (mudik di wilayah aglomerasi)," terang Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (7/5). "Kalau memang sama (pemerintah) pusat (izin mudik) dicabut untuk (wilayah) aglomerasi, ya, enggak bisa (mudik). Harus ketentuan itu yang dijalankan," tambah gubernur.

Terkait skema pengawasan terhadap warga DIY yang melakukan mudik lokal, Sultan belum bisa memberi penjelasan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sultan juga belum menerima arahan langsung dari Gugus Tugas Nasional. (rif/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005